

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang mendominasi konstelasi internasional sehingga dikenal dengan sebutan negara adidaya. Pencapaiannya sebagai negara adidaya dipengaruhi oleh setiap pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara dalam berbagai bidang yang ditujukan ke lingkungan eksternal (internasional) untuk memperjuangkan kepentingan nasional negara tersebut.¹ Hal ini sesuai dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bertujuan untuk memenuhi dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Ciri utama dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terlihat pada dua periode masa kejayaannya atau *Pax Americana* yaitu masa Perang Dingin dan Pasca Perang Dingin.²

Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat berada pada periode yang disebut sebagai *great power wars*.³ Saat itu, kehadiran Uni Soviet yang ingin menyebarkan paham komunisme menjadi ancaman utama bagi Amerika Serikat. Dalam menekan pengaruh Uni Soviet, Amerika Serikat membentuk aliansi dan memperluas perdagangan internasional sebagai upaya untuk

¹ Marjike Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, (New York: Palgrave Macmillan, 2007), hal 74.

² Agastya Wardhana dan Vinsensio M. A. Dugis, "Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump," *Global Strategis* 13, No. 2 (2019): 142.

³ Wardhana dan Dugis, "Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump," hal 142.

mengumpulkan sekutu agar tidak berpihak pada Uni Soviet. Pada dasarnya, Amerika Serikat mengembangkan aliansi untuk memperkuat keberadaan militernya untuk menekan pengaruh Uni Soviet seperti pembentukan North Atlantic Treaty Organization (NATO).⁴ Segala tindakan Amerika Serikat tercantum dalam kebijakan luar negerinya yang ingin mendominasi politik internasional dari Uni Soviet yang dianggap mengancam kekuasaan Amerika Serikat di dunia.

Setelah Perang Dingin berakhir, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya karena keberhasilannya menekan pengaruh Uni Soviet. Hal ini juga mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berfokus untuk menyebarkan hegemoni liberalnya melalui demokrasi dan kapitalisme di seluruh dunia.⁵ Sesungguhnya, hegemoni liberal Amerika Serikat sudah terlihat pada masa pasca Perang Dunia I atas keinginan Presiden Woodrow Wilson untuk mewujudkan perdamaian dengan negara-negara lain tanpa menggunakan kekerasan dalam sebuah organisasi yang bernama Liga Bangsa-Bangsa (LBB).⁶ Namun, kehadiran LBB tidak berlangsung lama dikarenakan pecahnya Perang Dunia II yang membubarkan organisasi tersebut. Dalam menyebarkan hegemoni liberalnya, Amerika Serikat kerap terlibat dalam konflik negara lain bahkan mampu untuk mengubah ideologi suatu negara

⁴ Wardhana dan Dugis, "Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump," hal 142.

⁵ Wardhana dan Dugis, "Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump," hal 142.

⁶ "League of Nations," *History*, 12 Oktober 2017, <https://www.history.com/topics/world-war-i/league-of-nations> (diakses pada 9 Mei 2022).

menggunakan dominasinya. Keterlibatan Amerika Serikat terlihat di kawasan Amerika Latin yang berada dalam satu benua dengannya.

Amerika Latin adalah suatu wilayah yang terletak di sebelah selatan benua Amerika dan merupakan bekas jajahan Spanyol dan Portugis. Melihat latar belakangnya menjadikan Amerika Latin sebagai kawasan yang mengalami krisis identitas politik dunia karena banyak negaranya yang menganut kebijakan otoriter paham sosialis.⁷ Dalam lima abad terakhir, kawasan tersebut telah diwarnai dengan rezim oligarki untuk melakukan dekolonisasi kawasan dari penjajah, yang sebenarnya hanyalah tipuan belaka dari golongan yang berkuasa untuk mengeksploitasi kawasan tersebut.⁸ Hal inilah yang memicu peningkatan kesenjangan yang menggerogoti sistem politik maupun ekonomi setiap negara di kawasan tersebut. Meluasnya pengaruh sosialis di Amerika Latin, menarik perhatian Amerika Serikat untuk mulai memperhatikan kawasan tersebut dengan tujuan perolehan hegemoni. Peningkatan kekuatan disintegratif di negara-negara seperti Kuba, Venezuela, Meksiko, dan Kolombia dapat mengancam keamanan regional Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat melakukan penyebaran hegemoni liberal melalui penerapan demokrasi dan perdagangan internasional di Amerika Latin termasuk Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia. Penyebaran

⁷ Indra Pahlawan dan Septian Wahyu, "Strategi Venezuela Menyepakati ALBA Dalam Menghadapi Ekspansi Perdagangan Amerika Serikat Dikawasan Amerika Latin," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1, No. 1 (Februari 2014): 1.

⁸ Pahlawan dan Wahyu, "Strategi Venezuela Menyepakati ALBA Dalam Menghadapi Ekspansi Perdagangan Amerika Serikat Dikawasan Amerika Latin," hal 2.

hegemoni liberal Amerika Serikat juga tidak terlepas dari keterlibatannya dalam urusan domestik setiap negara di Amerika Latin.

Penyebaran hegemoni liberal Amerika Serikat dilaksanakan melalui instrumen kebijakan luar negeri yang sekaligus menjadi citra dari politik luar negerinya. Kecenderungan utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Amerika Latin yaitu “intervensi” dengan memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, keamanan regional, dan pertumbuhan ekonomi.⁹ Amerika Serikat berhasil memulihkan demokrasi di Argentina dan Brasil yang semakin memperkuat hubungan mereka dan menguntungkan dalam Mercado Común del Sur atau Southern Common Market (Mercosur).¹⁰ Selain itu, Amerika Serikat membentuk Organization of American States (OAS) untuk mempromosikan demokrasi di negara-negara transisi seperti Paraguay, Guatemala, dan Ekuador.¹¹ Penyebaran demokrasi juga digunakan sebagai sarana untuk memerangi penggunaan obat terlarang yang meluas di kawasan tersebut, seperti di Meksiko dan Kolombia dengan membentuk The Andean Trade Preference Act (ATPA).¹² Alih-alih ingin memberantas penyelundupan obat terlarang, Amerika Serikat justru melanggar citra demokrasi itu sendiri dengan mengerahkan pasukan militer dalam memerangi kelompok bersenjata (kartel narkoba) yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dalam penyebaran

⁹ Donald E. Schulz, “The United States and Latin America: Shaping an Elusive Future,” *Strategic Studies Institute, US Army War College* (2002): 2.

¹⁰ Schulz, “The United States and Latin America: Shaping an Elusive Future,” hal 3.

¹¹ Terence Michael Garret, “An Analysis of U.S. Custom and Border Protection’s Tripartite Mexico Border Security Policy,” *Annales. Ethics in Economic Life* 21, No. 4 (2018): 92.

¹² Garret, “An Analysis of U.S. Custom and Border Protection’s Tripartite Mexico Border Security Policy,” hal 93.

hegemoni liberalnya, Amerika Serikat juga dianggap tidak mencerminkan apa itu nilai demokrasi dalam keterlibatannya yang bersekutu dengan kelompok politik sayap kanan untuk menggulingkan pemimpin otoriter dari politik sayap kiri seperti yang terjadi di Guatemala, Ekuador, Paraguay, dan Venezuela.¹³ Namun, saat ini Amerika Serikat sedang kewalahan dalam menghadapi kuatnya pengaruh sosialis dan anti-imperialisme di Venezuela yang mengutuk Amerika Serikat atas intervensinya yang berlebihan. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat semakin gencar terlibat pada konflik politik Venezuela untuk memperjuangkan demokrasi di negara tersebut.

Pada tahun 1998, Hugo Chávez berhasil menduduki kursi kepresidenan Venezuela. Sejak masa pemerintahan Presiden Chávez, hubungan Amerika Serikat dan Venezuela kian memburuk karena penolakan Presiden Chávez untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat. Selama masa kepemimpinannya, citra ideologi Venezuela dikenal dengan Chavismo atau sosialisme sesuai dengan ideologi negara tersebut, namun lebih mengedepankan usaha nasional tanpa bantuan internasional.¹⁴ Hal ini juga menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan pro-Chavismo dan anti-Chavista, yang mana hal ini dipicu oleh tindakan kontroversial Chávez yang memperluas lingkup kekuasaan presiden dengan menghapus kamar kongres dan mengakhiri batas jabatan presiden.¹⁵

¹³ Patrick J. Kiger, "How Venezuela Fell From the Richest Country in South America into Crisis," *History*, 9 Mei 2019, <https://www.history.com/news/venezuela-chavez-maduro-crisis> (diakses 17 Juli 2022).

¹⁴ Kiger, "How Venezuela Fell from the Richest Country in South America into Crisis," *History*, 9 Mei 2019 (diakses pada 17 Juli 2022).

¹⁵ Kiger, "How Venezuela Fell from the Richest Country in South America into Crisis," *History*, 9 Mei 2019 (diakses pada 17 Juli 2022).

Meskipun begitu, pemerintahannya secara signifikan berhasil mengurangi kemiskinan walaupun pendapatan negara terlalu besar bergantung akan minyak. Secara mengejutkan pada tahun 2013, Presiden Chávez meninggal dunia karena perjuangannya melawan kanker yang membuat wakil presidennya Nicolás Maduro Moros menduduki tahta kepresidenan menggantikan dirinya.¹⁶

Kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan Chávez. Saat memulai periode pemerintahannya, kedudukan Maduro sebagai presiden menuai kecaman dari beberapa pihak khususnya pihak oposisi yang dituduh melakukan kecurangan dengan selisih penerimaan suara 1,5% yang mana pihak Maduro mendapat 50,6% suara dan pihak oposisi Capriles Henrique mendapat 49,1% pada pemilu tahun 2013.¹⁷ Mengabaikan tuduhan tersebut, Maduro segera mengkonsolidasi kekuasaannya dengan otoritas yang diberikan oleh Majelis Nasional untuk memerintah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selama masa kekuasaannya, ia tidak dapat menghentikan penurunan harga minyak yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Inflasi naik sebesar 50% menyebabkan masyarakat tidak bisa membeli bahan pokok seperti susu, tepung, dan tisu toilet.¹⁸ Ketidakpuasan dengan penanganan ekonomi oleh pemerintah Maduro dan peningkatan kejahatan, masyarakat sipil serta

¹⁶ Jennifer L. McCoy, "Venezuela," *Britannica*, 6 Oktober 2021, <https://www.britannica.com/place/Venezuela> (diakses pada 17 Juli 2022).

¹⁷ "Maduro Menang Pemilu Presiden Venezuela," *BBC News*, 15 April 2013, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/04/130415_nicolas_maduro_menang_pemilu (diakses pada 21 April 2022).

¹⁸ McCoy, "Venezuela," *Britannica*, 6 Oktober 2021 (diakses pada 21 April 2022).

kelompok sipil bersenjata non pemerintah melakukan aksi protes di jalanan San Cristóbal yang menyebar hingga ke Caracas dan menyebabkan sekitar selusin kematian.¹⁹ Permasalahan semakin memanas pada pemilihan presiden tahun 2018 yang kembali dimenangkan oleh Maduro dengan total pemungutan suara 67,7% melawan Henri Falcón dengan total 21,2%.²⁰ Dikarenakan semasa kepemimpinan Maduro semakin kacau, pihak oposisi terus menyatakan penolakan terhadap pemerintah Maduro. Hal ini menyebabkan meningkatnya gejolak politik yang menciptakan konflik politik antara pemerintah dan pihak oposisi.

Pada bulan Januari tahun 2019, pemimpin oposisi Juan Guaidó sekaligus kepala Majelis Nasional, meminta konstitusi Venezuela untuk menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan menyiapkan perebutan kekuasaan yang masih belum diselesaikan.²¹ Dari sisi pihak oposisi ingin memulihkan demokrasi yang terbengkalai justru bergesekan dengan perspektif pemerintah yang menganggap fenomena tersebut sebagai kudeta yang didukung oleh asing. Sehingga perebutan kekuasaan mengakibatkan mengikisnya kepercayaan satu sama lain antara pemerintah dan oposisi. Melihat konflik politik Venezuela, tidak terlepas dari keterlibatan negara besar seperti Amerika Serikat di dalamnya. Penetapan Guaido sebagai presiden Venezuela

¹⁹ McCoy, "Venezuela," *Britannica*, 6 Oktober 2021 (diakses pada 21 April 2022).

²⁰ "Venezuela Election: Maduro Wins Second Term Amid Claims of Vote Rigging," *BBC News*, 21 Mei 2018, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-44187838> (diakses pada 21 April 2022).

²¹ Kiger, "How Venezuela Fell from the Richest Country in South America into Crisis," *History*, 9 Mei 2019 (diakses 21 April 2022).

merupakan cikal bakal dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mengarah pada intervensi di negara tersebut.²²

Selain itu, Venezuela terkenal dengan sumber daya alam minyaknya yang melimpah. Berdasarkan data dari *BP Statistical Review 2019*, Venezuela menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan cadangan minyak bumi yang mencapai 302,8 miliar barrel, yang mana berhasil mengalahkan Arab Saudi sebagai negara juragan minyak bumi yang hanya memiliki 268,5 miliar barrel.²³ Hal inilah yang menjadi perhatian Amerika Serikat untuk dapat terlibat dalam urusan domestik negara Venezuela. Tidak dapat dipungkiri bahwa minyak bumi merupakan fokus utama Amerika Serikat untuk menggapai imperium global (tidak ada tandingan) sehingga minyak bumi dikatakan sebagai istilah “Kartu Amerika Serikat.”²⁴ Minyak bumi juga dijadikan sebagai dasar dari *energy security* oleh Amerika Serikat dikarenakan ketersediaan minyak bumi milik Amerika Serikat kian berkurang mengingat penggunaan yang besar saat perang terdahulu untuk pasokan senjata.²⁵ Hal ini mengakibatkan Amerika Serikat harus mengumpulkan cadangan minyak bumi dari negara-negara lain melalui kegiatan impor, yang mana hal tersebut

²² Hari Ariyanti, “Menelisik Bukti Keterlibatan AS dalam Upaya Penggulingan Rezim di Venezuela,” *Merdeka*, 15 Maret 2019, <https://www.merdeka.com/dunia/menelisik-bukti-keterlibatan-as-dalam-upaya-penggulingan-rezim-di-venezuela.html> (diakses pada 17 Juli 2022).

²³ Gustidha Budiartie, “Venezuela, Negara Minyak Terkaya Dunia yang Dirundung Petaka,” *CNBC Indonesia*, 21 Juli 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190721092059-4-86395/venezuela-negara-minyak-terkaya-dunia-yang-dukung-petaka> (diakses pada 17 Juli 2022).

²⁴ Roni Gunawan, “Minyak Bumi, “Kartu AS” Sang Adidaya Amerika Serikat,” *Kompasiana*, 23 Januari 2012, <https://www.kompasiana.com/ronigunawan/550d7360813311502cb1e394/minyak-bumi-kartu-as-sang-adidaya-amerika-serikat> (diakses pada 17 Juli 2022).

²⁵ Gunawan, “Minyak Bumi, “Kartu AS” Sang Adidaya Amerika Serikat,” *Kompasiana*, 23 Januari 2012 (diakses pada 17 Juli 2022).

menjadi sensitif bagi Amerika Serikat karena takut eksistensinya menjadi menurun karena permasalahan minyak bumi. Maka dari itu, sasaran Amerika Serikat terhadap pemenuhan cadangan minyak bumi tertuju pada Venezuela.

Amerika Serikat dan Venezuela memiliki hubungan bilateral yang erat khususnya pada perdagangan barang antar kedua negara tersebut. Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar bagi Venezuela. Perdagangan barang bilateral antara kedua negara tercatat 1,3 miliar USD pada tahun 2020 yang menurun dari 3,2 miliar USD pada tahun 2019.²⁶ Perdagangan tersebut mencakup minyak bumi dan produk olahan minyak, mesin, bahan kimia organik, serta produk pertanian. Minyak bumi mendominasi impor Amerika Serikat dari Venezuela.²⁷ Namun, hubungan bilateral tersebut semakin memudar dikarenakan pemerintahan penuh kontra presiden Nicolás Maduro yang mengarah pada pembentukan negara gagal, yang mana dianggap mengganggu tercapainya kepentingan Amerika Serikat di negara tersebut. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat memutuskan untuk mengintervensi Venezuela sebagai pemenuhan fokus utamanya untuk mencapai imperium global.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai penyebaran hegemoni liberal yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap konflik politik domestik Venezuela semasa Nicolás Maduro dan berdampak pada krisis ekonomi negara tersebut. Mengingat Amerika Serikat

²⁶ "U.S. Relations with Venezuela," *U.S. Department of State*, 10 Maret 2022, <https://www.state.gov/u-s-relations-with-venezuela/> (diakses pada 17 Juli 2022).

²⁷ "U.S. Relations with Venezuela," *U.S. Department of State*, 10 Maret 2022 (diakses pada 17 Juli 2022).

memiliki kekuatan untuk terlibat dalam masalah domestik Venezuela yang tercermin dari kedekatan historis, dapat menempatkan negara tersebut dalam ambang kehancuran. Terlebih lagi penentangan kekuasaan Nicolás Maduro semakin gencar dilakukan oleh Amerika Serikat melalui pihak oposisi Venezuela. Dengan demikian, penulis akan menganalisis implikasi yang disebabkan oleh Amerika Serikat melalui judul penelitian “Kebijakan Hegemoni Liberal Amerika Serikat terhadap Konflik Politik Venezuela pada Masa Pemerintahan Nicolás Maduro.”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Meningkatnya gejolak politik domestik Venezuela saat ini dipicu oleh puncak masalah sejak kembali terpilihnya Presiden Nicolás Maduro pada tahun 2018 yang mendapat kecaman dan menuai kontroversi dari pihak oposisi bahkan Amerika Serikat terhadap legitimasinya. Sehingga penelitian ini berfokus meneliti implikasi dari penyebaran hegemoni liberal Amerika Serikat terhadap konflik politik domestik Venezuela yang mengakibatkan krisis ekonomi fatal negara tersebut. Berdasarkan penjabaran di atas, terdapat dua pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis meliputi:

1. Bagaimana Amerika Serikat menyebarkan hegemoni liberal terhadap konflik politik Venezuela dibawah kepemimpinan Nicolás Maduro?
2. Bagaimana implikasi dari penyebaran hegemoni liberal Amerika Serikat dalam konflik politik Venezuela terhadap situasi krisis ekonomi pada masa pemerintahan Nicolás Maduro?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penyebaran hegemoni liberal yang dilakukan oleh Amerika Serikat di tengah campur tangannya dalam konflik politik Venezuela pada masa kepemimpinan Nicolás Maduro.
2. Meninjau akibat yang ditimbulkan dari penyebaran hegemoni liberal Amerika Serikat dalam konflik politik Venezuela yang mengakibatkan krisis ekonomi pada masa pemerintahan Nicolás Maduro.

1.4 Kegunaan Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi pembaca mengenai besarnya pengaruh dari keterlibatan negara adidaya terhadap negara berkembang pada urusan domestik negara khususnya politik. Pembaca juga dapat menyadari bahwa keterlibatan negara adidaya pada negara berkembang berimplikasi memunculkan konflik baru dan krisis berkepanjangan yang tidak kunjung selesai dalam lingkup domestik negara tersebut. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi literatur dan tolak ukur bagi akademisi yang ingin meneliti keterlibatan negara adidaya terhadap negara berkembang khususnya Venezuela.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui lima

bagian, yaitu:

BAB I: Pada bagian ini menjelaskan latar belakang penelitian mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat digunakan sebagai upaya untuk memperluas hegemoninya di Amerika Latin khususnya Venezuela, kemunculan konflik yang terus mengalami eskalasi di Venezuela, dan alasan Amerika Serikat dalam konflik politik domestik di Venezuela. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan dua pertanyaan penelitian dalam menjabarkan topik. Bagian ini juga mencantumkan tujuan, kegunaan, dan sistematikan penulisan.

BAB II: Bagian ini memaparkan tinjauan pustaka yang diperoleh dari penelitian terdahulu guna menambah sudut pandang dan pengetahuan baru bagi penulis. Bagian ini juga dilengkapi dengan tinjauan teori dan konsep sebagai pedoman dalam menelaah pembahasan penelitian.

BAB III: Pada bagian ini menyajikan beberapa metodologi yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian memuat pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Bagian ini akan menjawab dan memaparkan pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Penulis akan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menyebarkan hegemoni liberalnya di tengah konflik politik Venezuela pada masa pemerintahan Nicolás Maduro dan apa saja dampak yang dihasilkan dari penyebaran hegemoni liberal Amerika Serikat terhadap situasi ekonomi yang mengalami krisis.

BAB V: Bagian akhir penelitian ini memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan topik oleh penulis. Penulis juga memberikan saran mengenai penyelesaian masalah kedua belah pihak baik Amerika Serikat maupun pemerintah Venezuela dalam menghentikan eskalasi konflik dan dampak yang ditimbulkan.

